

SIGN  
HERE

Volume XIII Edisi Januari 2012

H. Moh. Bahzar, M.Si



# Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial



Diterbitkan oleh:  
**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**



## DAFTAR ISI

ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU KELAS VIII MTS NEGERI JEMBER III TANGGUL TAHUN AJARAN 2010/2011 Sukidin & Widawati.....	1
ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Purnamie Titisari.....	14
KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS JASA INTERNET Nurul Qomariah.....	30
PENDEKATAN PENDIDIKAN BERBASIS KEMAJEMUKAN Muntolib.....	50
KEMISKINAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI Moh. Bahzar.....	66
PENDIDIKAN DALAM KONSTRUKSI MASYARAKAT SUKU DAYAK OT DANUM Helmut Y. Bunu.....	80
KESEJAHTERAAN TKI BERDASARKAN POLA MIGRASI INTERNASIONAL Evita Soliha Hani.....	92
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" (PARTICIPATORY RESEARCH DENGAN PENDEKATAN APRECIATIVE INQUIRY) Diah Puspaningrum.....	104

PEMBERIAN UMPAN BALIK UNTUK MENINGKATKAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA MATA KULIAH KONSEP DASAR IPS PGSD FKIP UNEJ TAHUN AJARAN 2011/2012 Chumi Zahroul F.....	129
--	-----

PENTINGNYA NASIONALISME BAGI BANGSA INDONESIA Asnar.....	145
---	-----

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL MODEL PENGAJARAN BERBASIS MASALAHDALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR Ahmad Mukhlisin.....	163
---	-----

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SD Miseni.....	175
---	-----



**JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

Merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian konseptual/analisis kritis dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan Sosial

**DEWAN REDAKSI  
JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**Ketua Penyunting**  
Dr. Sukidin, M.Pd

**Wakil Ketua**  
Sigit Yuliawan, S. Pd

**Penyunting Pelaksana**  
Prof. Dr. Bambang Hari Purnomo, M.A  
Dra. Sri Kantun, M.Ed  
Drs. Sugiyanto, M.Hum  
Drs. Budiyono, M.Si  
Drs. Kayan Swastika, M.Si

**Bendahara**  
Drs. Joko Widodo, MM

**Alamat Redaksi**  
Kampus FKIP Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember  
Kotak Pos 162 Telp/Fax (0331) 334988  
E-mail : sukidin2005@yahoo.co.id



- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah: Sketsa Bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Peradaban, 2002.
- McNeil, John D., *Curriculum: A Comprehensive Introduction*, Boston/Toronto: Little Brown and Company, 1977.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Keludupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, CINAPS, 2000
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zastrow, Charles, *Social Problems: Issues and Solution*, Australia/Canada/Denmark/Japan/Mexico/New Zealand/Philippines/Puerto Rico/Singapore/Spain/United Kingdom/United States: Wadsworth, 2000.

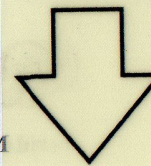
## KEMISKINAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Moh. Bahzar

*Abstraksi* : Reformasi dalam berbagai bidang (sosial, budaya, ekonomi dan politik) yang terjadi akhir-akhir ini tidak seharusnya berhenti pada tahapan dekonstruksi saja, artinya, akan berdampak menjadi "realitas anarki" yang menakutkan dan menimbulkan trauma sosial, tetapi harus juga ditindak lanjuti dengan proses rekonstruksi. Upaya rekonstruksi tersebut seharusnya dimulai dengan revitalisasi budaya tradisional yang selama ini dipandang masih efektif menjadi kontrol sosial. Artinya, kemiskinan yang memungkinkan ditempatkan sebagai sebab sekaligus akibat perubahan social pada aspek pembangunan di era globalisasi, harus segera diatasi agar perubahan social berlangsung secara dinamis dan konstruktif bagi pencapaian tujuan pembangunan.

*Kata Kunci* : kemiskinan, perubahan sosial, globalisasi

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah adanya kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tidak dibarengi dengan pemerataan, pilihan pinjaman luar negeri untuk sumber pembiayaan dengan paket pola pembangunan dari donor yang tidak sesuai dengan kebutuhan





riil masyarakat, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumberdaya alam yang kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, tumbuh suburnya budaya materialistis, globalisasi yang semakin merebak ke berbagai lapisan masyarakat, praktek KKN yang sistemik dan kronis dari aparat, politik pertanahan yang tidak adil, perencanaan pembangunan yang bersifat *top down*, pelaksanaan program yang berorientasi keproyekan, liberalisasi perekonomian yang terlalu dini tanpa persiapan yang memadai dan kebijakan pendukung yang kurang memperhatikan kelompok miskin telah meminggirkan rakyat kecil.

Kemiskinan itu memiliki suatu dinamika yang dapat menciptakan sub kultural tersendiri, yang biasanya muncul dalam suatu masyarakat yang sistem sosial ekonominya secara keseluruhan terlibat dalam proses transformasi menuju sistem kapitalistis. Budaya kemiskinan biasanya muncul secara struktural dimana gejalanya tampak pada beberapa ciri, seperti upah kerja yang rendah akibat sistem produksi diarahkan kepada usaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pengusaha. Tata nilai golongan pengusaha lebih berorientasi kepada akumulasi kekayaan dan efisiensi sehingga mengabaikan aspek-aspek sosial dari para pekerjanya. Dampak dari berkembangnya sistem kapitalisme tersebut menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan posisi yang serba sulit karena lemahnya akses terhadap organisasi sosial ekonomi maupun politik bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Tumbuhnya budaya materialistis, adanya krisis moral dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan suburnya praktek KKN yang sistemik dan kronis dari para oknum aparat dan pengusaha yang membawa kebangkrutan negara dan belum



pulihnya perekonomian nasional. Akibatnya, kelompok rakyat kecil semakin tidak menikmati hasil pembangunan dan sebaliknya ikut menanggung beban akibat *mislanning* dan *mismanagement* dari kebijakan pembangunan itu sendiri.

Melihat realitas di atas, kemiskinan sebagai penyebab sekaligus akibat perubahan social di era globalisasi meninggalkan banyak masalah krusial. Pengentasan kemiskinan selanjutnya memerlukan langkah solutif yang tidak mudah. Untuk itu, problema kemiskinan tentu sangat menarik untuk ditinjau ulang.

Berkaitan dengan ilustrasi kemiskinan yang masih terus berlanjut di tengah-tengah perubahan dan dinamika masyarakat, apalagi kemsikinan jika ditinjau sebagai akibat derasnya globalisasi, maka tulisan ini akan menelusuri implikasi pembangunan dalam perspektif perubahan social di era globalisasi.

## PEMBAHASAN

Kebijakan industrialisasi yang kurang mendasarkan pada kandungan muatan lokal sebagai mesin pertumbuhan menjadikan sektor ini amat tergantung dengan pihak luar, rawan terhadap gejolak moneter internasional serta sektor pertanian dan perekonomian perdesaan.

Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa betapa rapuhnya fondasi pembangunan kita di masa lalu. Prof. Sarbini mengemukakan bahwa kita belum mempunyai *grand strategy* pembangunan yang utuh dan begawan ekonomi, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo telah menghimbau perlunya segera menyusun strategi besar ekonomi pasca krisis yang berorientasi masyarakat.



Dari kalangan penggagas dan perumus *grand strategy* ini, ikhtiar untuk memberikan kontribusi dan advokasi dalam penanggulangan kemiskinan dan menegakkan hak-hak orang miskin sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Seluruh proses yang dijalankan kalangan masyarakat sipil itu menegaskan fakta bahwa: wajah kemiskinan sangat kompleks dan memiliki ciri kedalaman kemiskinan yang berbeda di tiap komunitas dan wilayah, kemiskinan juga semakin meluas pada sektor dan komunitas tertentu karena tekanan eksternal, terutama terjadinya krisis ekonomi politik, yang muncul ke permukaan melalui fakta-fakta: membesarnya jumlah komunitas miskin kota yang hidup di daerah-daerah rawan kesehatan dan lingkungan; mahalnnya akses pelayanan jaminan sosial di desa maupun kota, semakin lemahnya kontrol petani kecil atas tanah pertanian, swastanisasi pengelolaan hutan negara yang mendesak perumusan kembali hubungan petani sekitar hutan dengan "pengelola" hutan negara yang ternyata juga tidak menguntungkan petani, banyaknya kasus perdagangan manusia (perempuan dan anak perempuan sebagai tenaga kerja tanpa dokumen di negara lain), korban eksploitasi seksual di dalam dan di luar negeri. Yang disebut terakhir ini, juga memperkuat fakta semakin meluasnya wilayah *feminisasi kemiskinan*.

Fakta-fakta kunci itu dalam konsultasi publik yang terselenggara, ternyata juga didapati kenyataan ironi, bahwa respon pemerintah-meski telah memahami kenyataan kemiskinan yang multidimensi-dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeragamkan fakta kemiskinan, dan menggantungkan pada dukungan dana donor. Akibatnya kemudian, persoalan-persoalan penanggulangan kemiskinan semakin memburuk.

Dari keseluruhan proses yang dijalankan kalangan masyarakat sipil itu pula dapat dinyatakan bahwa pilihan tindakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

pemerintah sangat reduksionistik, dianggap tidak memadai lagi, dan untuk itu, perlu ditinggalkan.

Untuk konteks Indonesia, Negara kita masih menghadapi masalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tingkat kemiskinan pun berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain. Beberapa daerah yang tidak mempunyai sumber alam tapi lebih kaya dari daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Hal ini tentu merupakan ironi pembangunan.

Pemerintah daerah dimanapun berupaya membuat kebijakan ekonomi untuk melepaskan daerah mereka dari belitan kemiskinan. Namun mereka tidak pernah berhasil menghapus kemiskinan dari wilayah mereka. Sampai saat ini masih banyak orang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara yang tepat suatu daerah melepaskan diri dari kemiskinan. Strategi pertumbuhan ini percaya bahwa efek menetes ke bawah akan terjadi dengan sendirinya.

Wilayah yang mempunyai banyak penduduk miskin disebut wilayah miskin. Wilayah miskin ditandai oleh pendapatan perkapita yang rendah, produktivitas penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesenjangan yang tinggi antar yang kaya dan yang miskin. Kemiskinan mencakup pula ketidaksetaraan secara sosial, rasa tidak aman, buta huruf, kondisi kesehatan yang buruk, kesempatan terbatas untuk berkembang, atau tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk pengembangan diri dan tidak ada kesempatan untuk realisasi diri.

Pembangunan ekonomi regional berupaya mengurangi kemiskinan. Memang dalam berbagai literatur dipakai istilah



menghapus kemiskinan, tapi ini hal yang mustahil dilakukan. Kemiskinan dilihat sebagai cara hidup yang ditandai oleh konsumsi kalori yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas perumahan dan fasilitas sosial lain. Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan materi, pendidikan dan kesehatan yang rendah, kerentanan orang miskin terhadap berbagai resiko, dan tidak mempunyai kekuatan terhadap terpaan guncangan ekonomi makro. Disinilah pemerintah daerah mampu melakukan berbagai upaya melalui berbagai program dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya.

Hingga saat ini Indonesia masih terus berkuat dengan kemiskinan. Jika dibanding dengan awal kemerdekaan, saat ini Indonesia telah berhasil menekan kemiskinan, namun belum sepenuhnya berhasil menuntaskan kemiskinan. Salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jangan heran jika tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) juga bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang penduduk miskinnya sangat banyak dan ada daerah lain yang penduduk miskinnya sedikit.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melepaskan negeri ini dari belitan kemiskinan. Ketika pemerintahan orde baru naik ke tampuk kekuasaan para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi percaya bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan jika menerapkan strategi pembangunan yang mempunyai efek menetes ke bawah (*trickle down effects*). Para penganut teori ini

percaya bahwa strategi utama pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi atau dalam retorika pemerintah orde baru yaitu memberbesar kue pembangunan. Mereka percaya jika pertumbuhan telah tercapai maka secara otomatis akan terjadi pemerataan karena proses menetes ke bawah berlangsung secara otomatis.

Krisis ekonomi selain menghancurkan perekonomian makro juga menghancurkan ekonomi rumah tangga. Banyak kejadian rumah tangga masuk dalam perangkap kemiskinan kronis (*chronic poverty*) setelah krisis. Rumah tangga yang awalnya hanya bertahan hidup setelah krisis bertambah buruk kondisi ekonominya. Akibat lanjutan dari krisis ekonomi adalah fragmentasi keluarga dan yang paling menderita dalam hal ini adalah perempuan. Tingkat perceraian meningkat sebagai akibat semakin banyak orang yang stres.

Kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi setiap daerah. Kemiskinan merupakan masalah multi-dimensi, jadi bukan semata mata masalah ekonomi atau masalah pengembangan sumberdaya manusia yang selama ini dipahami. Kemiskinan menyangkut pula hak untuk bersuara, hak untuk memperjuangkan nasib mereka. Jika hak ini tidak ada maka orang miskin sangat rentan terhadap kesewenangan dan korupsi. Ini menyangkut pula kurangnya kebebasan bertindak, kebebasan memilih dan kesempatan (Pegg; 2003).

Masalah kemiskinan ini bukan saja menjadi masalah masing masing wilayah tapi sudah menjadi komitmen bersama secara global untuk menghapusnya. Oleh karena itu upaya penghapusan kemiskinan selalu melibatkan lembaga donor internasional. Dalam upaya tersebut Bank Dunia dan lembaga internasional lain mencanagkan *Millenium Developmen Goals* (MDGs) (Sachs; 2005). Ini adalah komitmen politik yang harus tercapai dalam rangka perdamaian global. Ada beberapa tujuan



yang ingin dicapai melalui program MDGs ini seperti:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim atau kronis
2. Memberikan pendidikan dasar bagi semua anak
3. Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian bayi
5. Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan
6. Menghambat penyebaran penyakit menular hiv/aids
7. Menjamin pelestarian lingkungan
8. Membangun kerjasama pembangunan secara global.

Lembaga internasional sudah mempunyai komitmen agar program MDGs ini sudah terlihat hasilnya pada tahun 2015. Masalah kemiskinan ekstrim sudah harus berakhir pada tahun 2025. Hal ini berarti sebelum 2025 banyak negara sudah keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam rangka keberhasilan program ini perlu ada komitmen keuangan dari negara maju membantu lembaga lembaga donor internasional (Sachs; 2005).

Di negara mana pun upaya menghapus kemiskinan tidak mungkin dilepaskan pada sektor swasta tapi merupakan tugas utama pemerintah. Namun pemerintah perlu menyadari bahwa pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses jangka panjang dan bukan untuk jangka pendek (The NGO Committee for Social Development 2003). Oleh karena itu ketika pemerintah daerah membuat rencana pembangunan regional yang perlu diperhatikan adalah dimensi keberlangsungan. Untuk itu pemerintah perlu menyadari beberapa hal berikut:

1. Perlu pemahaman pemerintah bahwa proyek pembangunan selalu untuk jangka panjang;
2. Konsekuensinya perlu ada tanggung jawab jangka panjang untuk manajemen dan pengawasan;
3. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan teknologi dasar;
4. Menjamin stabilitas sosial dengan menciptakan stabilitas

politik sehingga tidak terjadi perang dan konflik sosial. Pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi di daerah yang tidak aman dan penuh konflik;

5. Mengintegrasikan pelayanan sosial dengan struktur ekonomi;
6. Menghapus korupsi; dan
7. Melakukan *streamline* struktur birokrasi.

Dalam upaya menghapus kemiskinan ada beberapa masalah yang sering dihadapi pemerintah di negara berkembang yaitu, konsep, konten, koordinasi, korupsi, dan kontinuitas. Masing masing akan dibahas lebih rinci. Walaupun yang diungkapkan ini masalah yang banyak dialami di negara berkembang di Asia Selatan dan Afrika, namun tidak berarti tidak terjadi di Indonesia.

1. Masalah konsep. Pemahaman konsep kemiskinan oleh pemerintah daerah turut pula berpengaruh pada strategi pengentasan kemiskinan. Sering pemerintah tidak bersungguh-sungguh ingin menghapus kemiskinan tapi dipakai sebagai komoditas politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Misalnya, dalam hal kelangkaan pupuk misalnya, pemerintah membuat kebijakan pengadaan pupuk agar partai yang berkuasa semakin populer dan mendapat suara banyak dalam pemilu.
2. Masalah konten. Kelemahan pengentasan kemiskinan bisa disebabkan oleh konten yang kurang. Misalnya, pengentasan kemiskinan sering bersifat top-down dan kurang melibatkan aspirasi masyarakat bawah. Pemerintah daerah tidak mempunyai pengetahuan tentang kondisi lokal sehingga upaya pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan buku-buku teks umum yang tidak bersentuhan dengan realita kemiskinan masyarakat setempat.
3. Masalah koordinasi. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam



pengentasan kemiskinan. Sering program kerja satu lembaga tumpang tindih dengan lembaga lain atau malah bertentangan. Hal semacam ini terjadi karena koordinasi antar lembaga sangat lemah.

- 4. Masalah korupsi. Banyak pengalaman menunjukkan program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik karena ada bagian dana yang hilang. Korupsi menyebabkan pemberdayaan masyarakat miskin tidak mencapai tingkat kualitas seperti yang diharapkan. Korupsi tidak selamanya tidak dalam bentuk uang. Bisa terjadi bahwa sasaran pemberdayaan yang seharusnya untuk orang miskin ternyata dinikmati orang kaya di suatu wilayah karena kelompok ini mempunyai pengaruh politik yang lebih kuat. Kita sering mendengar pemberian dana yang seharusnya untuk masyarakat miskin diterima mereka yang mampu. Akibatnya masyarakat miskin tetap bergelut dalam kemiskinan.
- 5. Masalah kontinuitas. Dalam hal pengentasan kemiskinan sering terjadi pergantian rezim tidak mendukung kebijakan sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada kesombongan kekuasaan seorang kepala daerah tidak ingin hidup dalam bayangan kepala daerah sebelumnya. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan setiap program hanya bertahan terbatas pada masa kekuasaan seorang kepala daerah. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan masyarakat miskin karena program pemberdayaan bisa berhenti setelah masa kekuasaan seorang pejabat berakhir.

Berkaca dari langkah alternative dan solutif tersebut, masalah kesehatan dan pendidikan menduduki peringkat tertinggi untuk mendapat perhatian serius. Dengan menyediakan peluang dan fasilitas kesehatan dan pendidikan seluas mungkin bagi rakyat, negara secara langsung sudah membagi aset untuk masa kini dan masa

depan. Kesehatan dan pendidikan adalah area dimana negara dan pemerintah memiliki kendali untuk menolong rakyatnya bebas dari kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan adalah jalur utama bagi kaum miskin dan kaum perempuan untuk bebas dari pemiskinan dan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang luas dan bermutu akan menaikkan kesempatan ekonomi dan sosial bagi kaum miskin dan perempuan menjadi rakyat yang kuat, warga negara yang cerdas.

Kurangnya perhatian dan investasi pada masalah kesehatan dan pendidikan justru akan melanggengkan proses-proses pemiskinan. Dengan begitu yang perlu dilakukan adalah:

- 1. Program wajib belajar 9 tahun sepenuhnya harus didanai oleh pemerintah termasuk pembebasan SPP dan pengadaan buku teks mulai SD sampai SMA. Termasuk didalamnya gaji guru SD dan SMA dan petugas kesehatan harus dikoreksi dan dinaikkan sejajar dengan gaji anggota parlemen.
- 2. Alokasi belanja anggaran 20 bagi pendidikan seperti ditetapkan oleh TAP MPR perlu segera dilaksanakan dan salah satu elemennya adalah membentuk Dana Beasiswa Nasional untuk membantu orang tua dan murid yang miskin untuk menikmati pendidikan sd sampai SMA harus disediakan oleh negara.
- 3. Perlu dibentuk Komisi Pendidikan Nasional Mutu sekolah dasar dan menengah harus dirombak dan diperbaiki.
- 4. Posyandu dan puskesmas sebagai garda depan layanan kesehatan publik bagi ibu dan anak harus memperoleh dana yang memadai guna menyelamatkan generasi hilang dan menekan angka kematian ibu melahirkan. Termasuk di dalamnya guna penediaan vitamin-vitamin dan imunisasi yang sangat diperlukan.



## KESIMPULAN

Kekayaan yang melimpah di tengah ketimpangan dan kemelaratan adalah tidak bermoral dan tidak adil. Dalam konteks ini, restrukturisasi relasi politik dan redistribusi kekayaan adalah penting jawaban atas ketimpangan dan pemiskinan. Restrukturisasi bisa menjadi menjadi jalan bagi penerjemahan kembali hubungan rakyat dengan negaranya yang lebih adil. Dan sementara itu, redistribusi atas kuasa, aset, kesempatan ekonomi dan sosial dapat dijadikan sebagai jawaban atas marjinalisasi, eksklusi dan diskriminasi.

Oleh karena itu, reformasi dalam berbagai bidang (sosial, budaya, ekonomi dan politik) yang terjadi akhir-akhir ini tidak seharusnya berhenti pada tahapan dekontruksi saja, artinya, akan berdampak menjadi "realitas anarki" yang menakutkan dan menimbulkan trauma sosial, tetapi harus juga ditindak lanjuti dengan proses rekontruksi. Upaya rekontruksi tersebut seharusnya dimulai dengan revitalisasi budaya tradisional yang selama ini dipandang masih efektif menjadi kontrol sosial. Artinya, kemiskinan yang memungkinkan ditempatkan sebagai sebab sekaligus akibat perubahan social pada aspek pembangunan di era globalisasi, harus segera diatasi agar perubahan social berlangsung secara dinamis dan kontributif bagi pencapaian tujuan pembangunan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bendix, Reinhard, 1977, *Bureaucracy, International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Free Press.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2010. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 903/2477/SJ tgl. 5 Desember 2010 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002.

- Gani, Ascobat. 2010. *Kesehatan dan Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur*. The John Hopkins University, Center for Communication Program. Jakarta.
- Hartono, Bambang, 2010. *Penataan Sistem Kesehatan Daerah*, Departemen Kesehatan R.I, Jakarta
- Keban, Jeremias T. 2000. *Pengantar Administrasi Publik. Modul untuk Matrikulasi Program Magister Manajemen*. UGM.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta
- Organization for Economic Co-operation and Development. 2000. Chapter 1 : Principles of the system of health accounts. In : *A System of Health Accounts*. Paris: OECD
- Poullier JP, Hernandez P. 2000. *Estimates of National Health Accounts (NHA) for 1997*. Geneva : WHO (GPE Discussion Paper No.27)
- Rannan-Eliya, Ravi P. 2010. *Status of National Health Accounts in Asia-Pacific Region : Results of the APNHAN Survey 2010*. Asia-Pacific National Health Accounts Network
- Smith, Abel (1992). *Health Expenditure in Indonesia, Seminar Ekonomi Kesehatan*. Cimacan
- Tangcharoensathien, Viroj, A.Laixuthai, J.Vasavit, N.Tantigate, W.P.Ruffolo, D.Vimolkit, J.Lertiendumrong. 1999. *National Health Accounts Development : lessons from Thailand. Health Policy and Planning; 14 (4) : 342-353*
- Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, *Menyoal Birokrasi Publik*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.



World Health Organization, 2002. *NHA Producers Guide: chapter 1*

13. Geneva: WHO

Kamanto Sunarto, 1989, , *Sosiologi Kesehatan*, Jakarta

## PENDIDIKAN DALAM KONSTRUKSI MASYARAKAT SUKU DAYAK OT DANUM

*Helmut Y. Bunu*

**Abstract:** Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: tingkat pendidikan anak-anak Suku Dayak Ot Danum dan tipologi konstruksi masyarakat suku Dayak Ot Danum terhadap pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, perspektif konstruksi sosial. Setting penelitian ini yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: *Pertama*, tingkat pendidikan anak suku Dayak Ot Danum dipengaruhi oleh: 1) kondisi sosial-ekonomi orang tua, 2) *consciousness* orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan 3) minat bersekolah anak. *Kedua*, pemetaan konstruksi masyarakat terhadap pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Tipologi pertama, suku Dayak Ot Danum yang mengkonstruksi bahwa pendidikan bernilai, bermanfaat, dan mampu meningkatkan harkat dan martabat anak sekaligus orang tua. Tipologi kedua, suku Dayak Ot Danum yang mengkonstruksi bahwa pendidikan tidak mempunyai makna apa-apa, tidak mampu memberikan kepastian terhadap masa depan anak, dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan anak di kemudian hari. Tipologi pertama, akan menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan sosial-ekonominya.

**Kata Kunci :** *Konstruksi sosial, Suku Dayak Ot Danum, pendidikan sosial*